PROBLEM INTRINSIK DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: ANALISIS FILSAFAT POLITIK TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi
Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Email: lailiy@ugm.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas problem intrinsik gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait dengan politik pengelolaan lingkungan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya alam di Indonesia, masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Unsur-unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, induksi-deduksi, refleksi, idealisasi, dan heuristika. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih berada dalam pusaran paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan intrinsik dalam aktualisasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain berupa karut marutnya aturan perundangan terkait pola pengelolaan lingkungan hidup, politik anggaran yang eksploitatif, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi oligarki dalam pengelolaan sumberdaya. Keempat hal tersebut secara kumulatif masih terus terjadi dalam praktik politik pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan akhirnya sekedar menjadi jargon politik. Untuk keluar dari persoalan intrinsik tersebut harus ada re-orientasi pola pembangunan di Indonesia. Orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus lebih fokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan keterjebakan pada pertumbuhan ekonomi pada kenyataan justru membuat situasi semakin melampaui batas pertumbuhan yang memicu krisis ekologi dalam jangka panjang.

Kata kunci: antroposentrisme; pembangunan berkelanjutan; politik lingkungan; utilitarianisme

INTRINSIC PROBLEM IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA: POLITICAL PHILOSOPHY ANALYSIS ON THE PRACTICE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA AFTER REFORM ERA

ABSTRACT. This study aims to carry out a critical analysis of the intrinsic problem of the idea of sustainable development in Indonesia, specifically related to the politics of environmental management in Indonesia after the reform. This is based on the fact that the level of environmental damage, especially natural resources in Indonesia, is still high. This research is a library research that uses political philosophy as a method of analysis. The methodical steps taken in this research are interpretation, induction-deduction, reflection, idealization, and heuristics. Based on the analysis, it can be concluded that the adoption of the idea of sustainable development in Indonesia is still in the vortex of the anthropocentrism and utilitarianism paradigms. This has led to the emergence of various intrinsic problems in the actualization of sustainable development in Indonesia. These problems include chaotic of laws and regulations related to environmental management patterns, exploitative budget politics, weak law enforcement, and oligarchic domination in resource management. These four things cumulatively continue to occur in the practice of environmental management politics in Indonesia. This shows that sustainable development eventually becomes merely a political jargon. To get out of these intrinsic problems there must be a reorientation of development patterns in Indonesia. Development orientation not only pursue economic growth, but also focus on efforts to realize a just and civilized humanity. This is because the traps on economic growth in fact actually make the situation more and more beyond the limits of growth which triggers the ecological crisis in the long run.

Keywords: antropocentrism; environemtal politics; sustainable development; utilitarianism

PENDAHULUAN

Membahas isu lingkungan hidup akan selalu terkait erat dengan persoalan aksi kolektif. Mengapa demikian, karena hampir setiap persoalan lingkungan muncul sebagai akibat dari tindakan kolektif. Kecenderungan ini telah diprediksi oleh Garret Hardin (1968) melalui karyanya yang berjudul *The*

Tragedy of The Commons yang menjelaskan bahwa tindakan rasionalitas individu untuk mengeksploitasi suatu sumber daya bersama (*common pool resource*) secara berlebihan akan menimbulkan tindakan-tindakan tidak rasional. Artinya, ketika setiap individu berupaya untuk mengambil keuntungan secara maksimal dalam mengeksploitasi sumberdaya alam, bencana akan menimpa semua individu tersebut,

misalnya dalam bentuk menipisnya jumlah sumber daya serta munculnya berbagai implikasi negatif (Wuryandari, 2011).

Berbagai bentuk eksploitasi atas sumber daya sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh individu ataupun masyarakat, tetapi juga negara, bahkan dalam skala yang lebih luas dan masif. Negara menggunakan berbagai sumber daya yang ada di teritorialnya untuk memenuhi berbagai “kebutuhan” melalui berbagai kebijakan yang ada. Secara normatif, negara dituntut untuk mampu memetakan kebutuhan-kebutuhan tersebut secara adil sehingga proses pemanfaatan sumber daya tidak mengarah pada model eksploitatif yang rentan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan turunnya daya dukung alam.

Pada konteks Indonesia, kewenangan terkait pengelolaan sumber daya diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur model pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam berbagai kebijakan dan regulasi di bawahnya, seperti misalnya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan berbagai UU sektoral seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan lain sebagainya. Berbagai regulasi tersebut dibuat dengan tujuan sebagai petunjuk arah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya di Indonesia agar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, seringkali muncul ketidak-sinkronan dalam praktik antara UU PPLH dengan UU yang bersifat sektoral tersebut. Pada praktiknya, UU Sektoral ditengarai lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya ekonomi, sedangkan UU PPLH lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan (Hakim, 2015). Pada UU PPLH khususnya Paragraf 8, Pasal 42, 43, dan 44 misalnya memberikan penjelasan secara jelas tentang instrumen ekonomi dalam lingkungan hidup yang memberikan tekanan bagi perencanaan kegiatan pembangunan dan ekonomi harus dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada pasal tersebut dijelaskan tentang berbagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan sebagai upaya untuk penanggulangan ataupun pemulihan kondisi lingkungan yang rusak akibat eksploitasi sumber daya. Namun sayangnya, internalisasi biaya lingkungan ini pada praktiknya tidak terlalu efektif bahkan banyak yang tidak berjalan. Selain problem

terjadinya *discrepantie* antara realitas dengan normativitas seperti tersebut di atas, beberapa pasal pada UU sektoral justru membuka peluang bagi terjadinya konflik kepentingan. Seperti misalnya pada Pasal 38 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk area pertambangan dapat diizinkan oleh menteri serta disetujui oleh DPR. Pada Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 juga memberikan peluang bagi perubahan peruntukan kawasan hutan sejauh memperoleh persetujuan dari pemerintah dan DPR. Pada titik inilah kemudian sering terjadi benturan kepentingan, mengingat mayoritas anggota parlemen yang juga berprofesi sebagai pebisnis atau terafiliasi dengan perusahaan. Penelusuran Tempo (2019) misalnya menunjukkan 45,5% dari 575 anggota DPR terafiliasi dengan perusahaan pada berbagai sektor. Hal ini ditengarai oleh banyak pihak akan mempengaruhi pilihan kebijakan yang diambil, sehingga lebih cenderung mengutamakan sektor ekonomi dibandingkan lingkungan. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa berbagai praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada sejauh ini cenderung mengarah pada eksploitasi dengan tujuan pengejaran pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan catatan sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, fase Orde Baru misalnya secara jelas menunjukkan orientasi atas developmentalisme (Hidayat, 2011). Berbagai kebijakan dimunculkan sebagai alat untuk melegitimasi dan menjustifikasi proses eksploitasi sumberdaya yang dilakukan. Sementara itu, pada Orde Reformasi meskipun secara normatif telah diadopsi gagasan pembangunan berkelanjutan namun sayangnya praktik eksploitasi sumber daya alam tetap saja dijalankan.

Lebih lanjut, praktik eksploitasi sumber daya alam tersebut sangat jelas terlihat pada politik anggaran yang digunakan pemerintah, khususnya dalam menentukan prioritas sumber pendapat negara dari berbagai sumber daya alam yang ada baik yang dapat diperbarui maupun tidak. Politik anggaran yang eksploitatif inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya krisis ekologi dalam jangka panjang. Fakta empiris menunjukkan bahwa pada bidang kehutanan misalnya, Forest Watch Indonesia mencatat bahwa tingkat deforestasi hutan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar emisi gas karbon. Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi keenam terbesar di dunia dalam hal emisi gas karbon (FWI, 2018). Pada sektor pertambangan, penanganan galian bekas tambang juga tak pernah direklamasi dengan benar, bahkan tidak jarang menimbulkan korban dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan (Maimunah, 2018). Selain itu, konflik terkait hak pengelolaan atas sumberdaya, baik hutan maupun tambang juga masih banyak terjadi.

Kondisi-kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa banyak persoalan yang sesungguhnya belum terselesaikan dalam pola pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan selama ini. Adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan yang semula diyakini mampu menjembatani tuntutan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan secara beriringan ternyata belum dapat diwujudkan. Apabila dilihat dari berbagai fakta yang ada, maka pola pengelolaan lingkungan yang berjalan selama ini masih lebih banyak memberikan konsekuensi negatif bagi lingkungan, dibandingkan melestarikannya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kondisi lingkungan menjadi semakin terdegradasi. Kondisi ini mengakibatkan munculnya problem lanjutan pada sektor lingkungan, yang ditandai dengan meningkatnya kerusakan lingkungan yang mengarah pada kondisi krisis.

Untuk mengetahui *state of the art* penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa. Penelitian Setianingtyas dkk. (JEP LIPI, 2019) menunjukkan bahwa dari empat dimensi yang ada dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, indikator lingkungan dan kelembagaan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Selain penelitian tersebut di atas, penelitian tentang pembangunan berkelanjutan yang mengambil studi kasus di beberapa wilayah di Indonesia juga telah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya adalah penelitian dari Sofianto (2019) yang menyimpulkan bahwa banyaknya tantangan dalam integrasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah disebabkan indikator-indikator program pembangunan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah serta minimnya data di daerah. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Oxtavianus (2014) menyimpulkan bahwa program pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada konteks penelitian ini pendekatan parsial dan komposit telah dilakukan oleh peneliti dan dapat disimpulkan bahwa kemajuan pada bidang ekonomi dan sosial telah dilakukan dengan menekan bidang lingkungan, sehingga program pembangunan berkelanjutan di Indonesia baru mencapai 2/3 dari target maksimum.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tentang pembangunan berkelanjutan sebelumnya lebih berfokus pada model kasus pelaksanaan di beberapa wilayah di Indonesia dan upaya mencari indikator dan mengukur keberhasilan program pembangunan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan, namun jarang yang melihat konsep pembangunan berkelanjutan secara lebih kritis, utamanya dari segi

instrinsiknya. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis kritis atas problem intrinsik yang terjadi dalam gagasan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pola pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia pasca reformasi, dengan menggunakan pendekatan filsafat politik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Sebagai metode analisis, filsafat politik diletakkan sebagai *higher level of abstraction* yaitu sebagai cara pandang terhadap fenomena politik yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada segi-segi tertentu politik untuk dijadikan dasar dalam memahami segi-segi politik yang lain. Melalui mekanisme *higher level of abstraction* filsafat politik akan menguraikan dan menjelaskan hubungan antara entitas-entitas sosial dan bagian-bagiannya, sehingga akan diperoleh suatu cara pandang (*global picture*) terhadap fenomena politik. Berdasarkan cara kerja yang demikian maka filsafat politik akan dapat membuktikan bahwa di dalam cara pandangnya tidak terdapat fenomena politik yang tidak ter jelaskan. Selain berfungsi sebagai *higher level of abstraction*, pada konteks ini filsafat politik juga berfungsi sebagai *low order of abstraction*, sehingga tetap mempunyai dampak praktis dalam politik. Melalui mekanisme *low order of abstraction* filsafat politik dapat menghasilkan rekomendasi tertentu dalam praktik politik, misalnya dalam bentuk kajian kebijakan (Undang-undang misalnya) maupun institusi-institusi tertentu yang telah ada (Benn, 1967).

Mengutip Bakker (1990), analisis data dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur metodis sebagai berikut: a) Interpretasi: peneliti berusaha memahami makna yang terkandung dalam data untuk menemukan situasi problematis, berupa struktur hakiki serta nilai-nilai dasar yang berperan di dalam problem aplikasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia; b) Induksi dan deduksi: proses ini berjalan secara sinergis, dalam arti ketika data telah dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan identifikasi serta kategorisasi untuk menemukan problem intrinsik dalam realisasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka pada saat yang bersamaan hal tersebut juga diperkuat dengan tinjauan konkret atas berbagai situasi dan kondisi yang terjadi akibat dari problem tersebut; c) Refleksi dan idealisasi: Setelah diketahui dan dipahami situasi yang terjadi dalam objek material yang diteliti, selanjutnya ditemukan berbagai macam inkonsistensi, ketidak selarasan, ataupun penyimpangan. Berdasarkan hal ini maka dapat disusun sebuah konsepsi filosofis yang bersifat

korektif menuju ke arah idealisasi konsep tertentu; dan d) Heuristika: berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan ke dalam konsep baru yang representatif dan proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Pada konteks ini ilmu politik, khususnya politik lingkungan diletakkan sebagai pijakan awal dalam mendeskripsikan fakta politik yang ada. Adapun tahapan selanjutnya akan menjadi tugas filsafat politik sebagai *second research*. Melalui pendekatan filsafat politik yang digunakan akan dikonstruksi sebuah tatanan sosial politik yang baik, benar, dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Reformasi dan Jargon Politik Pembangunan Berkelanjutan

Pasca Reformasi, tuntutan demokratisasi di Indonesia terjadi di setiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Orientasi pembangunan juga mulai mengalami pergeseran dengan memasukkan unsur-unsur kelestarian lingkungan dalam berbagai pengelolaan sumberdaya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan ditetapkannya UU PPLH sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut diyakini memiliki spirit yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Bahkan dikatakan bahwa UU tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menerapkan gagasan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU PPLH adalah adanya penguatan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan yang hal ini sejalan dengan prasyarat bagi terwujudnya kondisi ke arah pembangunan berkelanjutan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan sesungguhnya telah mulai mengambil tempat semenjak tahun 1980-an, seiring dengan munculnya berbagai kritik atas modernitas dengan industrialisasi sebagai motor utamanya. Modernitas yang mengedepankan eksploitasi berbagai sumber daya alam pada kenyataannya kemudian memunculkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Pola pikir rasionalis, positivis, dan keyakinan yang kuat pada teknologi pada kenyataannya tetap tidak mampu

menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang muncul pasca eksploitasi sumber daya. Terjadinya perubahan iklim, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan berbagai bencana lingkungan lainnya merupakan fakta yang tidak bisa ditolak, bahwa alam telah mengalami penurunan daya dukung. Hal inilah yang kemudian menjadi latar bagi riset yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan dari *Massachusetts Institute of Technology* tentang batas pertumbuhan. Pada *Limits to Growth* dipaparkan bahwa ketika manusia terus menerus mengejar pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi yang hal ini diikuti dengan pesatnya pertumbuhan penduduk bumi, maka konsekuensi logis yang kemudian timbul adalah pencemaran lingkungan yang akan semakin tinggi, serta daya dukung alam yang semakin menurun. Apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menjadi sebuah ancaman bagi peradaban (Meadows, 1972).

Berdasarkan hal tersebut di atas gagasan pembangunan berkelanjutan, atau di dalam dunia internasional dikenal istilah *sustainable development*, muncul dan ditawarkan secara global. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah upaya konsensus atas tarik ulur isu lingkungan dan ekonomi kemudian didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di mana kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, investasi, penggunaan teknologi, dan perubahan institusi yang ada selalu konsisten dalam memerhatikan kebutuhan generasi yang akan datang sebagaimana perhatiannya pada kebutuhan generasi saat ini (Mitchell, 2000). Atas dasar inilah gagasan pembangunan berkelanjutan kemudian dianggap mampu menjembatani problem lingkungan di satu sisi dan ekonomi pada sisi yang lain. Pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menjadi sebuah mekanisme baru dalam politik pengelolaan lingkungan.

Namun sayangnya, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri semenjak kemunculannya telah mengandung problem intrinsik, yaitu: Apa sesungguhnya yang diharapkan untuk tetap berkelanjutan? Apakah ekonomi atau lingkungan? Hal ini yang menyebabkan gagasan pembangunan berkelanjutan mendapat banyak kritik, karena dianggap memiliki inkonsistensi internal dan cenderung memunculkan kapitalisme dalam bentuk baru. Corak pembangunan berkelanjutan yang sangat teknosentris kemudian mencoba untuk mendesain ulang pasar dan proses produksi untuk disesuaikan dengan mekanisme kerja alam. Skema pembangunan berkelanjutan juga menggunakan mekanisme pasar dan akumulasi kapital untuk melakukan prediksi atas kondisi alam di masa yang akan datang. Kestabilan stok kapital dari alam menjadi syarat utama bagi tercapainya kondisi lestari (Banerjee, 1999).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan pun masih berpijak pada paradigma antroposentris. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam praktiknya, gagasan pembangunan berkelanjutan akan sangat bergantung pada sisi mana ia ditonjolkan. Hal ini berarti bahwa gambaran ideal tentang semua kepentingan dapat disinergikan (khususnya ekonomi dan lingkungan) telah menutup mata dari realitas praktis bahwa lingkungan/alam memiliki nalar bekerjanya sendiri yang tidak pernah dapat dipaksa untuk tunduk terhadap mekanisme politik, terlebih mekanisme pasar. Akibatnya, resep pembangunan berkelanjutan untuk menyinergikan eksploitasi sumber daya dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hanya berhenti di tataran normatif. Karena pada praktiknya, hampir semua proses eksploitasi sumberdaya lebih memperhitungkan dampak ekonomi dibandingkan lingkungan. Sebagai contoh adalah skema semacam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang lebih sering berhenti sebatas syarat administratif dengan mengabaikan fungsi preventif maupun evaluatif yang seharusnya diutamakan dan dijalankan.

Politik Pengelolaan Lingkungan dalam Pusaran Antroposentrisme dan Utilitarianisme

Belum efektifnya gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pasca reformasi disebabkan karena masih kuatnya dua paradigma utama dalam pengelolaan sumber daya, yaitu antroposentrisme dan utilitarianisme. Pada paradigma antroposentrisme, alam diletakkan sebagai objek yang hanya akan bernilai jika dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia (Keraf, 2005). Oleh karena itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam sudut pandang ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan selayaknya demikian. Sifat instrumentalisme dalam antroposentrisme mengakibatkan relasi yang terbangun antara manusia dan alam akan selalu bersifat eksploitatif. Keberadaan dunia tumbuhan maupun binatang hanya dipandang sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Kondisi ini semakin dikokohkan dengan digunakannya mekanisme hukum dan politik sebagai alat legitimasi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terkait eksploitasi sumber daya.

Pada perkembangan lebih lanjut, paradigma antroposentris tersebut di atas kemudian menyatu dengan watak manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut, yaitu "*the cornucopia view of nature, faith in technology, growth ethic, materialism, and individualism*" (Susilo, 2014: 64). *The cornucopia view of nature* adalah pandangan yang meyakini bahwa alam

semesta terbentang luas dan tidak akan pernah habis. Oleh karena itu meskipun lingkungan terus menerus dieksploitasi kondisi lingkungan akan tetap pulih seperti sedia kala atau selalu akan mampu membaik kembali.

Faith in technology merupakan keyakinan yang menganggap bahwa teknologi dapat menyelesaikan segala masalah. Keyakinan akan teknologi ini sesungguhnya berpijak pada rasionalisme modern yang memiliki corak positivistik. Berbeda dengan tahapan ontologis dan metafisik yang masih berpusat pada sesuatu hal di luar diri manusia, pada fase ini pusat persoalan berfokus pada manusia dengan rasio yang dimilikinya. Manusia dengan rasionya diyakini akan mampu mengembangkan teknologi dengan berbagai macam inovasi yang lebih efisien, cepat, dan bersifat massal. Manusia dengan teknologinya akan mampu menghadirkan berbagai hal yang dahulu tidak terjangkau menjadi terwujud. Seperti misalnya berkembangnya berbagai peralatan modern yang berbasis teknologi modern yang bersifat lebih efisien. Berbagai macam kemajuan yang diperoleh melalui teknologi itulah yang kemudian meyakinkan manusia bahwa teknologi tidak hanya mampu melakukan eksploitasi terhadap lingkungan, namun teknologi juga mampu menyelesaikan dampak-dampak negatif yang muncul dari eksploitasi tersebut.

Ketiga yaitu *growth ethic* yaitu etika untuk ingin terus maju. Adanya industrialisasi dan modernisasi telah mampu mengubah pemikiran manusia akan ethos, dimana akumulasi material dipandang sebagai ukuran keberhasilan. Akibatnya sumberdaya yang semula pasif menjadi dieksploitasi secara masif. Hal ini dikarenakan semakin berhasil manusia melakukan eksploitasi atas sumberdaya alam, maka dirinya dipandang semakin sukses dalam menjalani hidup. Kondisi ini selaras dengan semakin banyaknya *material income* yang didapatkan meskipun hal tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan.

Keempat *materialisme*, dalam perspektif modernitas salah satu indikasi yang digunakan untuk menempatkan masyarakat telah berada pada posisi masyarakat modern adalah *high mass consumption*. Kemodernan diukur dengan tindakan-tindakan konsumsi, sehingga konsumsi tidak lagi sekedar untuk menjaga kelangsungan hidup, melainkan konsumsi telah beralih pada fungsi menciptakan gaya hidup. Canda yang sangat kuat ini akan mengakibatkan manusia akan terus menerus berupaya untuk memuaskan nafsu konsumsinya melalui berbagai upaya eksploitasi sumberdaya yang dimiliki.

Kelima *individualism* yaitu sikap yang lebih menekankan dorongan personal tanpa memikirkan kepentingan atau bahkan kerugian pihak lain.

Sikap ini akan mengakibatkan manusia hanya berpikir untuk kepentingan dan keberhasilan dirinya tanpa memikirkan akibat yang akan diterima oleh kelompok masyarakat lain. Ketika sekelompok masyarakat memiliki hak-hak untuk menguasai dan mengelola, sementara itu ada kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki akses kekuasaan sama sekali, struktur yang demikian ini menyebabkan watak individualisme akan berkembang dengan subur. Sementara itu tidak jarang yang kemudian terjadi adalah kelompok masyarakat yang tidak terlibat karena tidak adanya akses kekuasaan tersebut justru harus menanggung beban kerusakan lingkungan, sedangkan pelaku perusakan lingkungan yang sesungguhnya melarikan diri.

Kondisi menjadi lebih sulit ketika paradigma antroposentris yang telah menyatu dengan watak-watak tersebut di atas kemudian berkelid dengan politik utilitarian pada sisi pengambil kebijakan. Utilitarianisme lebih dikenal sebagai bentuk filsafat moral dan politik yang mendasarkan pada gagasan bahwa tindakan atau kebijakan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Setidaknya, demikian definisi yang diberikan oleh kaum utilitarianisme tradisional tentang *utility*, yang dikenal dengan slogan “*greatest happiness of the greatest number*” (Mulgan, 2007: 9).

Utilitarianisme sebagai sebuah mainstream politik yang menekankan pada aspek utilitas (kemanfaatan) secara intuitif sangatlah menarik. Hal ini disebabkan karena utilitarianisme akan mempertimbangkan setiap tindakan atau kebijakan dari sisi manfaat atau tujuan akhir, serta tidak bergantung pada hal yang bersifat metafisik (Kymlicka, 2004). Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam sudut pandang utilitarianisme akan selalu dikalkulasi beban/ biaya dan manfaatnya (*cost-benefit analysis*). Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah hal-hal apa saja yang kemudian akan dihitung sebagai beban/ biaya dan hal-hal apa saja yang dihitung sebagai manfaat?

Pada kenyataannya definisi *utility* itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat diperdebatkan, setidaknya ada empat definisi *utility* menurut Kymlicka (2004, dalam Muthmainnah, dkk., 2020: 37-38), yaitu:

1. Hedonisme kesejahteraan

Utility dalam sudut pandang hedonisme kesejahteraan didefinisikan sebagai pengalaman atau sensasi kenikmatan. Manusia akan selalu berupaya mengejar kesenangan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*) karena hal ini merupakan kebutuhan empiris manusia. Proses ini kemudian akan dilakukan melalui kalkulasi secara kuantitatif antara *hedon* dan *dolor*. Tindakan yang dikatakan baik adalah

tindakan yang lebih banyak memberikan hedon (kenikmatan) dan meminimalkan dolor.

2. Kemanfaatan keadaan mental non hedonistik
Definisi *utility* yang kedua adalah kemanfaatan keadaan mental non hedonistik. Pada definisi *utility* yang kedua, *utility* dimaknai sebagai semua bentuk pengalaman atau sensasi yang dialami oleh manusia, sehingga tidak sekedar direduksi dalam satu keadaan mental “bahagia” saja. Artinya, semua bentuk pengalaman manusia memiliki nilai utilitas yang berbeda-beda.

3. Kepuasan preferensi

Definisi *utility* yang ketiga adalah kepuasan preferensi. Meningkatkan kemanfaatan berarti memuaskan preferensi seseorang apapun preferensinya tersebut. Definisi ini memperoleh banyak kritik karena telah mengaburkan pemahaman antara apa yang sekarang ini disukai oleh seseorang dengan apa yang berharga untuk dimiliki atau dilakukan seseorang. Karena “apa yang baik atau bernilai bagi seseorang” sangat mungkin berbeda dengan “apa yang diinginkannya atau menjadi preferensinya sekarang”. Pada konteks ini, memiliki keinginan atau preferensi tidak membuat sesuatu bernilai, melainkan karena sesuatu hal (objek) tertentu memiliki nilai maka seseorang memiliki preferensi terhadapnya.

4. Preferensi yang berpengetahuan

Definisi *utility* yang keempat adalah preferensi yang berpengetahuan. Menurut sudut pandang ini, *utility* harus dimaknai sebagai kepuasan preferensi yang didasarkan pada informasi yang lengkap dan pertimbangan yang benar (rasional).

Dari beberapa definisi *utility* tersebut di atas, *utility* sebagai hedonisme kesejahteraan begitu dominan digunakan khususnya dalam kalkulasi *cost-benefit* dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan maupun sumberdaya. Oleh karena itu yang kemudian terjadi adalah *utility* kemudian sekedar dimaknai dalam konteks kenikmatan fisik, yang dapat dikuantifikasi ataupun dikalkulasi secara ekonomis. Hal ini tentu sangat bermasalah ketika digunakan dalam pola pengelolaan lingkungan hidup. Mengapa? Karena problem lingkungan hidup, sebagaimana problem kesehatan dan keamanan seringkali jika dihitung secara positif atau dengan model *cash value* (nilai real), akan lebih menunjukkan beban dibandingkan manfaat. Padahal jika dikalkulasi dalam jangka panjang, maka hal tersebut akan lebih banyak memberikan kemanfaatan.

Upaya maksimalisasi *utility* yang dilakukan melalui skema kebijakan tersebut merupakan model *rule utilitarianism* atau utilitarianisme tidak langsung.

Melalui pola ini, penghitungan *utility* tidak dilakukan secara langsung oleh setiap individu sebagai U-Agent sebagaimana yang terjadi dalam *act utilitarianism*, melainkan lebih sebagai mekanisme politis (*political utilitarianism*) (Kymlicka, 2004; Mulgan, 2007). Prinsip utilitas ini digunakan oleh lembaga-lembaga sosial dan pemerintah guna menjamin maksimalisasi *utility* yaitu terwujudnya kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar masyarakat (Kymlicka, 2004; Mulgan, 2007). Model *rule utilitarianism* ini bersifat teleologis yang menempatkan maksimalisasi *utility* sebagai *telos* yang harus dituju dan tidak memfokuskan pada gagasan tentang egalitarian sebagaimana yang diyakini pada *act utilitarianism*. Sudut pandang ini menekankan pada upaya untuk membawa keadaan menjadi lebih baik dan tidak memfokuskan pada prinsip memperlakukan orang secara sama (egalitarian). Hal ini disebabkan karena manusia hanyalah satu bagian saja di dalam jaringan pemaksimalan *utility*. Oleh karena itu pusat perhatian tetap diletakkan pada keadaan kebaikan (*telos*) yang dalam konteks ini berupa pemaksimalan *utility* (Kymlicka dalam Muthmainnah, dkk., 2020: 39).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa mekanisme politik utilitarian inilah yang diadopsi dalam pola-pola pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya di Indonesia. Tetapi kembali, muara persoalannya adalah pada apa yang dimaknai sebagai *utility*. Jika *utility* sekedar dimaknai sebagai hedonisme kesejahteraan yang mengarah pada *cash value*, maka akan sangat positivistik dan kuantitatif. Akibatnya, hal-hal yang bersifat normatif akan cenderung diabaikan dalam proses penghitungan ini. Padahal, problem lingkungan tidak dapat semata-mata dihitung dengan mekanisme yang demikian. Artinya, apabila kalkulasi yang dilakukan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan secara langsung dan jangka pendek, maka aspek kelestarian lingkungan akan selalu dianggap sebagai penghambat bagi upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan pemerintah harus menghitung dengan sungguh sangat hati-hati biaya lingkungan tersebut dan efeknya dalam aspek keberlanjutan yang bersifat lintas generasi. Kondisi seperti inilah yang seringkali membuat para pengambil kebijakan kemudian mengambil jalur praktis dengan menjalankan mekanisme *business as usual*, dimana ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama.

Kuatnya perspektif antroposentrisme dan utilitarianisme dapat dilihat pada level kebijakan maupun implementasi. Sebagai contoh, pada level kebijakan misalnya perubahan aturan tentang Minerba, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengancam

keberlangsungan hutan lindung maupun konservasi. Hal ini disebabkan UU tersebut mengisyaratkan semua kawasan, termasuk hutan lindung dan konservasi boleh dieksplorasi. Kemudahan dan kelonggaran untuk melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung pada akhirnya dikhawatirkan akan berujung pada eksploitasi yang pada akhirnya akan menghasilkan efek eksternalitas seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Sementara itu pada level implementasi kebijakan, kondisi menjadi lebih kompleks, mengingat konflik kepentingan yang muncul antara berbagai pihak, baik pemilik modal, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Seperti misalnya perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas juga ditengarai berkaitan erat dengan kepentingan kaum oligarkhi untuk melakukan eksploitasi pertambangan di kawasan hutan. Ketika status hutan lindung sudah diturunkan menjadi Hutan Produksi Tetap ataupun Hutan Produksi Terbatas, maka kawasan hutan dapat digunakan untuk aktivitas pertambangan melalui Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini jelas memunculkan persoalan pada level implementasi terutama berkaitan dengan kemampuan peminjam melakukan reklamasi dan mengembalikan objek pinjam pakai kawasan hutan seperti semula. Sebagai contoh lubang bekas tambang batubara di wilayah DAS Air Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdapat kurang lebih 5000 lubang bekas galian tambang batubara yang tidak direklamasi di kawasan hutan area tersebut. Di wilayah Kalimantan Timur terdapat 1.735 lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi. Bahkan berdasarkan laporan dari JATAM Kaltim, sampai dengan September 2020 telah menyebabkan 39 orang meninggal akibat tenggelam di lobang bekas galian tambang (Yovanda, 2020).

Problem Intrinsik dalam Strategi Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa keberadaan UU PPLH merupakan mekanisme strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengaplikasikan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada Bab II Pasal 2 misalnya, negara ditempatkan sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Negara melalui mekanisme pengelolaan yang dijalankan diharapkan mampu memberikan kemanfaatan sumberdaya bagi semua pihak, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah pengelolaan lingkungan hidup yang merusak atau tidak lestari.

Sayangnya, negara lebih banyak mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Alih-alih menggunakan prinsip kehati-hatian, kelestarian, dan keberlanjutan dalam setiap pengambilan kebijakan, pilihan paradigma pembangunan yang sampai dengan saat sekarang masih didominasi oleh *developmentalisme* telah membuat pola-pola eksploitasi atas sumberdaya alam masih tetap terjadi. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, praktik eksploitasi tambang di kawasan hutan merupakan contoh riil terkait hal ini. Ribuan bekas galian tambang batubara yang tidak direklamasi dengan baik telah menyebabkan tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini jelas menunjukkan kegagalan negara dalam pengelolaan sumberdaya. Masyarakat diletakkan sebagai pihak yang harus menanggung beban eksternalitas pasca pengelolaan sumberdaya, tanpa dibarengi dengan distribusi kesejahteraan yang adil atas eksploitasi sumberdaya di wilayah mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi manfaat dan resiko dalam eksploitasi sumberdaya alam yang ada.

Adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan pasca reformasi yang semula diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang positif, yang mampu menyinergikan aspek ekonomi di satu sisi, dengan aspek kelestarian lingkungan pada sisi yang lain ternyata belum dapat dilaksanakan dengan konsisten. Pada praktiknya dinamika politik lingkungan tetap didominasi oleh kepentingan ekonomi dengan penggerak utama industrialisasi. Akibatnya, kekhawatiran bahwa arah perubahan politik pengelolaan lingkungan akan berhenti di tataran normatif, sungguh terjadi. Perubahan yang sudah terjadi dalam level politis dengan di sahkannya UU PPLH sebagai strategi praktis dalam pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan belum diaplikasikan secara masif, efektif, dan konsisten dalam keseharian tata kelola lingkungan hidup.

Hal tersebut di atas terjadi karena beberapa faktor:

Pertama, keberadaan UU PPLH yang menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya lebih sering tidak sejalan dengan UU sektoral tentang pengelolaan sumberdaya. Sebagaimana dijelaskan di pendahuluan, UU Sektoral lebih cenderung mengedepankan orientasi ekonomi dibandingkan lingkungan hidup. Sebagai contoh UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang posisinya menggantikan UU No. 4 Tahun 2009. UU ini ditengarai memberikan akses yang terlalu mudah bagi para pemegang ijin usaha pertambangan untuk memperoleh perpanjangan IUPK secara otomatis (2x10 tahun). Hal ini disebabkan adanya perubahan aturan terkait hal tersebut yang tertuang pada pasal 169a UU No. 3 Tahun 2020, yaitu yang semula “berpeluang diperpanjang” menjadi “dijamin”

diperpanjang dengan lebih sedikit melibatkan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang terkena dampak eksploitasi. Padahal sebagaimana diatur dalam UU PPLH pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di wilayahnya, serta mereka juga-lah yang lebih memahami kondisi daerahnya pasca eksploitasi. Perpanjangan secara otomatis tersebut secara tidak langsung telah mengabaikan aspek evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan antar generasi (hukumonline.com, 2020).

Selain kondisi yang seringkali tidak sinkron antara UU PPLH dengan UU sektoral sebagaimana dijelaskan di atas, dalam UU sektoral sendiri juga terjadi kondisi tumpang tindih antar peraturan perundangan di dalamnya. Hal ini muncul sebagai akibat dari banyaknya kepentingan yang masuk dalam setiap peraturan baru yang muncul. Sebagai contoh adalah tumpang tindih aturan perundangan dalam hal pengelolaan sumber daya hutan. Berdasarkan hasil inventarisasi dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017 ditemukan 71 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan. 71 peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari 8 Undang-Undang, 14 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 1 Keputusan Presiden, dan 45 Peraturan Menteri. Hal tersebut di atas belum termasuk Perda-Perda di seluruh Provinsi/Kabupaten yang berjumlah puluhan terkait dengan pengelolaan hutan. Kondisi ini semakin menunjukkan karut marutnya pengelolaan hutan di Indonesia.

Kedua, politik penerimaan negara yang secara substantif masih berorientasi pada pola-pola eksploitasi sumber daya. Pada konteks Indonesia, kondisi tersebut dapat dilihat secara jelas pada postur penerimaan anggaran dan belanja negara. Berdasarkan hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011-2015 dapat diketahui bahwa 32% dari belanja negara dibebankan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hampir keseluruhannya bersumber dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan, minyak dan gas. Sementara itu hanya 1% yang bersumber dari penghasilan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, ketika terjadi defisit anggaran maka akan digunakan skema utang baru yang sebagian besar berkaitan dengan kegiatan investasi industri yang eksploitatif. Sementara itu pada sisi yang lain capaian program perbaikan sumber daya alam yang rusak akibat proses eksploitasi maupun industrialisasi masih sangat rendah. Hal ini berkebalikan dengan kondisi realisasi kebijakan yang berdampak terhadap kerusakan dan eksploitasi

justeru semakin meningkat. Sebagai contoh yaitu realisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) pada tahun 2010-2014 hanya mencapai 31,5% dari target yang ditetapkan sebesar 2,5 juta Ha (Seknas Fitra, 2015). Kondisi yang tidak jauh beda terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan laporan KLHK pada akhir tahun 2020 disebutkan bahwa Skema Perhutanan Sosial yang terbagi dalam lima kelompok (HKm, HD, HTR, HA, dan Kemitraan kehutanan) baru mencapai 3,592 juta Ha dari target 12,7 juta Ha yang dicanangkan pemerintah atau sekitar 28,28% (KLHK, 2020). Adapun perijinan yang berkaitan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan pada tahun 2010-2014 justru mengalami peningkatan, yaitu perkebunan meningkat 29%, ijin pinjam pakai sebesar 48,5%, proyeksi penambahan lahan kelapa sawit menjadi 20 juta Ha dan peningkatan produksi batubara sebesar 30% dalam lima tahun ke depan (Seknas Fitra, 2015). Hal ini jelas menunjukkan bahwa masih terdapat kegamangan dari pihak pemerintah Indonesia sendiri untuk mengambil posisi secara tegas terkait keberpihakannya pada pola pembangunan berkelanjutan. Pada praktiknya, pemerintah belum mampu menyeimbangkan aspek pengelolaan dan aspek perlindungan karena masih didominasi kebijakan-kebijakan yang sekedar pro ekonomi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan betapa prinsip kehati-hatian sebagai prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan belum banyak digunakan.

Ketiga, kondisi tersebut di atas menjadi semakin diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlu diingat bahwa ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa aspek, yaitu: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, peng-awasan, dan penegakan hukum (Pasal 4 UU PPLH). Pada tahap awal, perencanaan merupakan hal yang harus dikritisi secara cermat. Karena pada tahap perencanaan inilah seharusnya prinsip-prinsip penge-lolaan lingkungan tersebut di atas dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Artinya, sejak proses awal sebuah kebijakan muncul sesungguhnya sudah dapat dideteksi keberpihakannya kepada siapa. Selain tahap perencanaan, tahapan yang juga sangat krusial adalah pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini sangat penting mengingat masih tingginya pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan pengelolaan hutan, banyak korporasi yang tidak memenuhi prinsip pengelolaan hutan lestari (prinsip tebang pilih tebang tanam) tidak dijalankan, namun tidak dikenai sanksi yang tegas. Begitu juga halnya dengan eksploitasi tambang di kawasan hutan yang ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi kembali sehingga meninggalkan banyak lubang berbahaya karena mengandung zat kimia berbahaya. Sebagaimana telah disebutkan di sub-bab

sebelumnya bahwa hingga September 2020, JATAM Kaltim mencatat sekitar 1750-an lubang bekas galian tambang yang tidak di reklamasi. Sedangkan di Bengkulu kondisinya lebih parah, hingga mencapai lima ribuan lubang bekas galian tambang. Keberadaan lubang bekas galian tambang tersebut tidak hanya membahayakan lingkungan tetapi secara nyata juga telah mengakibatkan korban jiwa (Yovanda, 2020). Sementara itu pada bidang kehutanan, jumlah kawasan hutan yang mengalami deforestasi sampai dengan tahun 2019 masih mencapai 465,5 ribu Ha. Dari total hutan yang mengalami deforestasi tersebut, baru 3,1 ribu ha yang dapat direforestasi, yang sebagian besar kerusakan hutan tersebut berada di wilayah yang memiliki ijin pengelolaan (IUPHHK) (<https://www.menlhk.go.id/>). Meskipun penyebab deforestasi bisa jadi bermacam-macam, baik legal maupun illegal logging, juga kebakaran hutan, namun dari begitu kecilnya kemampuan untuk melakukan reforestasi sebagaimana disebutkan pada data tersebut di atas jelas menunjukkan tidak jalankannya prinsip pengelolaan hutan secara lestari. Hal-hal semacam ini menjadi preseden buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pada konteks inilah komitmen atau motivasi yang kuat untuk melaksanakan aturan perundangan yang telah ada secara konsisten mutlak diperlukan sehingga tidak akan terjebak lagi pada mekanisme *business as usual*.

Keempat, kuatnya dominasi oligarki dalam pengelolaan berbagai sumberdaya di Indonesia. Berdasarkan Laporan Walhi 2018 disebutkan bahwa Indonesia memiliki luas daratan 191.944.000 ha dan luas laut 327.381.000 ha, yang dari total luas wilayah Indonesia tersebut 30, 65% nya telah diusahakan atau setara dengan 159.178.237 ha. Dari total luas wilayah Indonesia yang diusahakan tersebut, 82,91% nya telah dialokasikan untuk korporasi. Kuatnya dominasi oligarki juga dapat dilihat pada berbagai sektor pengelolaan sumberdaya yang lain, misalnya perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan. Berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 disebutkan bahwa besarnya alokasi ijin usaha di sektor kehutanan yang telah dikeluarkan untuk korporasi adalah 95,76%. Kondisi ini tidak sebanding dengan akses yang diperoleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan umum yang hanya mencapai 4,14% dan 0,10%. Sementara itu menurut Walhi data ini bisa jadi akan lebih besar apabila perizinan daerah dapat terintegrasi dengan baik dengan data di kementerian atau lembaga.

Pada sektor perkebunan sawit misalnya, pertumbuhan industri kelapa sawit yang sangat fenomenal di Indonesia didominasi oleh 3 kelompok produsen, yaitu perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,86%, perkebunan rakyat (PR) sebesar

41,42%, dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar 6,72%. Luasan lahan untuk perkebunan sawit juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan *Indonesia Palm Oil Statistic*, luasan lahan sawit pada tahun 2006 yaitu 6,59 juta hektar dan secara signifikan meningkat menjadi 11,44 juta hektar pada tahun 2015 (Utami, dkk., 2017: 115).

Berdasarkan sebaran persentase produsen sawit tersebut di atas, lembaga *TuK Indonesia* (2010-2018) melakukan analisis terhadap pihak-pihak mana saja yang memiliki saham pada perkebunan sawit dalam skema Perkebunan Besar Swasta. Hasilnya sangat mengejutkan, karena dari 51,86% total lahan sawit yang ada di Indonesia tersebut hanya dikuasai oleh 25 perusahaan. Nama-nama perusahaan tersebut adalah sbb (Sahdan, ed., 2019:127-128) :

1. Jardhine Matheson Group lewat PT. Astra Agro Lestari Tbk
2. DSN Group lewat PT. Dharma Satya Nusantara Tbk.
3. Tanjung Lingga Group lewat PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
4. Sampoerna Group lewat PT. Sampoerna Agro Tbk.
5. Rajawali Group lewat PT. Eagle High Plantation Tbk.
6. Sungai Budi Group lewat PT. Tunas Baru Lampung Tbk.
7. Austindo Group lewat PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk.
8. PT. Provident Agro Tbk.
9. Gozco Group lewat PT. Gozco Plantations Tbk.
10. TPS Group lewat PT. Golden Plantation Tbk.
11. Sinar Mas Group lewat Golden Agri Resources
12. Wilmar Group lewat Wilmar International
13. Salim Group lewat Indofood Agri Resources
14. Harita Group lewat Bumitama Agri
15. Surya Dumai Group lewat First Resources
16. Kencana Agri Group lewat Kencana Agri
17. IOI Group lewat IOI Corporation
18. Genting Group lewat Genting plantations
19. Boon Siew Group lewat Oriental Holdings
20. Batu Kawan Group lewat Kuala Lumpur Kepong
21. Anglo-Eastern Group lewat Anglo Eastern Plantations
22. Musim Mas Group lewat Musim Mas
23. Royal Golden Eagle Group lewat Asian Agri
24. Darmex Agro Group lewat Darmex Agro
25. Triputra Group lewat Triputra Agro Persada

Adapun bank-bank yang memberikan modal untuk 25 perusahaan tersebut antara lain yaitu Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapura), CIMB Group (Malaysia), Malayan Banking

(Malaysia), Bank Negara Indonesia (Indonesia), Bank Mandiri (Indonesia), Credit Suisse (Swiss), Rabobank (Belanda), BNP Paribas (Prancis), dan Citigroup (Amerika Serikat).

Kondisi perkebunan besar swasta tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan Perkebunan Rakyat. Meskipun luas lahan yang dikelola oleh rakyat secara akumulatif cukup besar, yaitu 41,42% dari total lahan sawit yang ada, namun jumlah tersebut dikelola oleh jutaan rakyat Indonesia dan dukungan pendanaan yang masih sangat minim. Pada konteks inilah slogan bahwa sawit untuk kesejahteraan rakyat dapat dipertanyakan kembali, mengingat realitas menunjukkan ketimpangan distributif yang sangat nyata.

Kuatnya dominasi oligarkhi dalam pengelolaan berbagai sumberdaya alam di Indonesia ini semakin memperjelas orientasi pembangunan yang masih berkuat pada pengejaran pertumbuhan ekonomi. Pada konteks ini dapat disimpulkan bahwa tolok ukur dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya masih antroposentris dengan didominasi oleh mekanisme kalkulasi utilitarian. Akibatnya, berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan maupun sumberdaya cenderung terjebak pada perhitungan ekonomi jangka pendek atau *cash value*, dan cenderung mengabaikan normativitas.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasca reformasi, politik pengelolaan lingkungan di Indonesia sesungguhnya telah mengadopsi gagasan pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya strategis dari diadopsinya gagasan pembangunan berkelanjutan maka diundangkanlah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menyinergikan pola-pola pengelolaan lingkungan hidup maupun sumberdaya secara adil dan berkelanjutan baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun persoalan yang kemudian muncul dalam praktik adalah masih dominannya paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme dalam berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan maupun sumber daya. Akibatnya pembangunan berkelanjutan seolah hanya menjadi jargon politik semata. Persoalan pada level paradigmatis tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan lanjutan yang bersifat intrinsik dalam skema pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya di Indonesia pasca reformasi. Persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah: *Pertama*, karut-marutnya aturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya, khususnya antara UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan UU pengelolaan sumberdaya yang bersifat sektoral. *Kedua*, politik penerimaan negara yang masih didominasi oleh eksploitasi sumber daya dan investasi ekonomi. *Ketiga*, lemahnya penegakan hukum. *Keempat*, yaitu kuatnya dominasi oligarki ekonomi dalam eksploitasi sumberdaya alam. Untuk keluar dari kondisi tersebut, maka harus ada upaya untuk meninjau ulang orientasi pembangunan di Indonesia. Orientasi pembangunan seharusnya tidak sekedar pengejaran pertumbuhan ekonomi tetapi harus lebih fokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mekanisme ini harus lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dengan potensi-potensi kearifan lokal yang dimiliki bukan justru memperlebar ruang bagi oligarki maupun korporasi. Terbukti bahwa terjebak pada perhitungan ekonomis yang sangat matematis pada akhirnya justru membawa kondisi pengejaran pertumbuhan menjadi semakin tidak terkejar bahkan mengarah pada kondisi melampaui batas pertumbuhan.

Sebagai catatan akhir, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait pola pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya segera dilakukan di Indonesia yaitu: a) Meninjau berbagai model politik anggaran yang masih didominasi oleh model-model eksploitasi sumberdaya dan menggantinya dengan politik anggaran yang ramah lingkungan; b) Menata kembali aturan perundangan yang masih tumpang tindih khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan; c) Membangun sistem hukum yang kuat, mandiri, khususnya terkait penegakan hukum lingkungan; d) Meningkatkan peran aktif masyarakat lokal dengan *local wisdom* yang mereka miliki terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan e) Memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat secara terus menerus dan konsisten guna membangun kesadaran kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A dan Zubair, A. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banerjee, S. (1999). Sustainable Development and Reinvention of Nature. Presented in the *Critical Management Studies Conference Environment Stream*. Manchester UK.
- Benn, S.I. (1967). *Nature of Political Philosophy: The Encyclopedia of Philosophy Vol. Six*, New York: Crowell Collier & Mac Millan.
- Fauzi, A dan Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 30 No. 1, hal. 42-52, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1>
- Forest Watch Indonesia. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara*. Diakses dari https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf
- Hakim, D.I. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, hal. 1-19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Hardin, G. (1968). *The Tragedy of The Commons*. New York Avenue, Washington DC: American Association for Advancement of Sciene.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan : Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- HukumOnline. (2020). *Dinilai diskriminatif, Perubahan UU Minerba Digugat*. Diakses 20 November 2020. dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f15e3946c5a0/>
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Diakses dari https://www.menlhk.go.id/site/single_post/28.
- Keraf, A.S. (2005). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Koran Tempo. (2019). *Pebisnis Hampir Tempati Separuh Parlemen*. Diakses pada 20 Oktober 2020 dari: <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/446333/pebisnis-tempati-hampir-separuh-parlemen>
- Kymlicka, W. (2004). *Contemporary Political Philosophy: an Introduction* (terj. oleh Agus Wahyudi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maimunah, S. (2018). *Rezim Ekstraksi, Oligarki, dan Lubang Tambang*. Diakses 26 Oktober 2020 dari: <https://www.mongabay.co.id/2018/11/07>
- Meadows, D.H., et.al. (1972). *The Limits to Growth*. New York: Universe Books.
- Mitchell, B. (2000). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulgan, T. (2007). *Understanding Utilitarianism*. United Kingdom: Acumen Publised Limited Stockfield Hall.
- Problem Intrinsik dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi (*Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi*)

- Muthmainnah, L., dkk. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Posmodern, *Jurnal Filsafat*, Vol. 30 No. 1, hal. 23-45, <https://doi.org/10.22146/jf.49109>.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan*. Kemenkumham RI Jakarta.
- Sahdan, G. dan Setiyawati, Z. (2019). *Petani Buntung di Negeri Sawit*. Yogyakarta: The Indonesia Power for Democracy (IPD) bekerjasama dengan Serikat Perani Kelapa Sawit.
- Seknas Fitra. (2015). *Policy Paper Dampak Negatif kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan: Hasil Analisis APBN Tahun 2011-2015*. Jakarta : Seknas Fitra didukung oleh The Asia Foundation, Setapak, dan UKaid.
- Setianingtiyas, R., dkk. (2019), Permodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI* Vol. 27 No.2. Halaman: 61-74, <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol.17 No.1, <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>,
- Susilo, R.K.D. (2014). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
- Utami, R., dkk. (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi), *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 22 No. 2, hal. 115-126, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/issue/view/1895>.
- Walhi. (2018). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2018*. Diakses dari https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Layout_Tinjauan-Lingkungan-2018.pdf diakses 10 Juli 2019.
- Wuryandari, G. (2011). Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.8. No.1, hal. 1-13, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/482/292>
- Yovanda. (2020). *Kembali renggut Korban: sudah 39 nyawa melayang di lubang Tambang Batubara Kaltim*. Diakses 20 Oktober 2020, dari: <https://www.mongabay.co.id/2020/09/12/kembali-renggut-korban-sudah-39-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/>